



JURNAL KONSTITUSI

B 7

Volume 14 Nomor 3, September 2017

- Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung
Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari
- Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing
Baiq Setiani
- Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat
Samuel Saut Martua Samosir
- Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Achmadudin Rajab
- Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada Ansori
- Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan Faiq Tobroni
- Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme *Checks and Balances* System
Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti
- Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia
Timbo Mangaranap Sirait
- Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945
Firdaus dan Nalom Kurniawan
- Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang
Pan Mohamad Faiz

JK	Vol. 14	Nomor 3	Halaman 463 - 700	Jakarta September 2017	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN 2548-1657
----	---------	---------	----------------------	---------------------------	--------------------------------------

Terakreditasi LIPI Nomor: 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015
Terakreditasi DIKTI Nomor: 040/P/2014

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Vol. 14 No. 3	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN: 2548-1657	September 2017
Terakreditasi LIPI Nomor: 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015		
Terakreditasi DIKTI Nomor: 040/P/2014		

Jurnal Konstitusi memuat naskah di bidang hukum dan konstitusi, serta isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi adalah media triwulan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi
(Board of Editors)

- Pengarah**
(Advisers) : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., MA.
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM.
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M. Hum
Dr. Suhartoyo, S.H., M. H.
Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.
- Penanggungjawab**
(Officially Incharge) : M. Guntur Hamzah
- Pemimpin Redaksi**
(Chief Editor) : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
- Redaktur Pelaksana**
(Managing Editors) : Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.
Intan Permata Putri, S.H.
Melisa Fitria Dini, S.H.
- Sekretaris**
(Secretariat) : Yossy Adriva, S.E.
- Tata Letak & Sampul** : Nur Budiman
(Layout & cover)

Alamat (Address)
Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177
E-mail: jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id

Jurnal ini dapat diunduh di menu publikasi-jurnal pada laman www.mahkamahkonstitusi.go.id atau kunjungi OJS Jurnal Konstitusi di: <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index>

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii - vi
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung	
Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana, dan Ade Adhari.....	463-488
Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing	
Baiq Setiani	489-510
Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat	
Samuel Saut Martua Samosir	511-530
Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	
Achmadudin Rajab	531-552
Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada	
Ansori	553-572

Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan

Faiq Tobroni 573-600

Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme *Checks and Balances* System

Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti 601-619

Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia

Timbo Mangaranap Sirait 620-643

Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945

Firdaus dan Nalom Kurniawan 644-671

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Pan Mohamad Faiz 672-700

Biodata

Pedoman Penulisan

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat *Rumpon* di Provinsi Lampung

Constitutionality Rights of Indigenous People on the Ulayat Rumpon Rights In Lampung Province

Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat

Email: ahmadr@fh.untar.ac.id, yuwonoprianto@gmail.com,

tundjunghidayat@yahoo.com, adea@fh.untar.ac.id,

Naskah diterima: 28/07/2017 revisi: 15/08/2017 disetujui 04/09/17

Abstrak

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak *rumpon* sebagai hak ulayat laut. *Rumpon laut* secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat *rumpon* di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut *rumpon* pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat *rumpon* laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *socio-legal* yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah *das sollen* dan *das sein*.

Kata kunci : Konstitusionalitas, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, *Rumpon*.